

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

BAB IV. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. Urusan Wajib Yang Dilaksanakan

A.20. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian.

1. Pendahuluan

Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah periode 7 **Desember 2016** sebanyak 16.462 orang. Rincian PNS menurut jabatan adalah 1.673 orang menduduki jabatan struktural dari jumlah jabatan struktural sebanyak 1.794, yang menduduki jabatan fungsional khusus sebanyak 5.241 orang, dan 9.548 orang menduduki jabatan fungsional umum. Kualifikasi pendidikan PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah berpendidikan SD sebanyak 507 orang (3,1%), berpendidikan SMP sejumlah 683 orang (4,1%), berpendidikan SLTA sejumlah 4.458 orang (27,0%), berpendidikan D.I dan D.II sejumlah 226 orang (1,3 %), berpendidikan D.III dan Sarjana Muda sejumlah 2.150 orang (12 %), berpendidikan S1 dan D.IV sejumlah 6.440 orang (39 %), berpendidikan S2 sejumlah 2.063 orang (12,5 %) dan yang berpendidikan S3 sejumlah 12 orang (0,1 %). Dibandingkan dengan kondisi akhir tahun 2015 maka PNS yang berpendidikan SD sampai SMA mengalami penurunan, yaitu dari 3,54 % menjadi 3,1 %. Sedangkan PNS yang berpendidikan S1, S2 dan S3 mengalami kenaikan yaitu dari 15,96 % menjadi 49,8 %. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan pendidikan melalui tugas belajar dan ijin belajar cukup tinggi. Disamping itu dorongan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui kegiatan fasilitasi tugas belajar dan ijin belajar memberi manfaat yang signifikan.

Sejalan dengan telah dilaksanakan Reformasi Birokrasi di jajaran Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, integratif, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari KKN serta mampu melayani publik dengan baik, ditempuh antara lain melalui Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan ; Penerimaan CPNS dan Capra IPDN secara transparan, obyektif dan bebas KKN melalui sistem *Computer Assisted Test* (CAT) ; Pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi (Assessment Centre) yaitu fasilitasi pengukuran kompetensi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi lain, BUMN dan lembaga lainnya ; Penyelenggaraan Promosi Jabatan secara terbuka untuk pengisian dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ; Pelaksanaan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama seleksi kompetensi menggunakan lembaga Assessment Independen yaitu Assessment Centre POLRI; Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu ; Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah ditetapkan ; Peta jabatan telah ditetapkan ; Sistem informasi kepegawaian dapat diakses oleh pegawai (SIMPEG On Line) yang terintegrasi dan digunakan sebagai pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM ; Penanganan pengaduan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi maupun media masa ; Pengendalian gratifikasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta kewajiban pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi Pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Pengawas.

2. Program dan Kegiatan

- a. Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Kegiatan difokuskan pada Pengadaan CPNSD Pemprov.Jateng dan Fasilitas seleksi Pengadaan CPNSD Kab/Kota (Moratorium); Pengangkatan CPNS dan Fasilitas Kenaikan Pangkat PNS; Mutasi dan Pensiun PNS; Pemetaan PNS Potensial Untuk Menduduki Jabatan Struktural di Lingkungan Pemprov.Jateng; Penataan PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), Jabatan Administrasi dan Jabatan Pengawas; Tes Kompetensi Pejabat Struktural Pemprov.Jateng dan Fasilitas Pejabat Pem.Kab/Kota; Ujian Kedinasan PNS Pemprov.Jateng dan Fasilitas Ujian Kedinasan PNS Kab/Kota(TMMK); Fasilitas Tugas Belajar dan Ijin Belajar PNS Pemprov.Jateng; Layanan Administrasi Kepegawaian; Penganugerahan Tanda Jasa kepada PNS Pem.Prov.Jateng dan PNS Kab/Kota; Pengembangan Layanan Informasi Administrasi Kepegawaian serta Sinkronisasi Kebijakan Bidang Kepegawaian di Jateng;Pembekalan Bagi PNS yang Akan Purna Tugas; Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin PNS, serta Pengembangan Sistem Informasi Data Kepegawaian dengan anggaran sebesar Rp 12.469.177.000,-

- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan diarahkan untuk; pemeliharaan gedung kantor, perlengkapan gedung kantor, kendaraan dinas; penambahan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan publik dengan anggaran sebesar Rp 3.292.046.000,-

- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Fokus kegiatan melalui pelatihan teknis kepegawaian, pengembangan teknologi informasi dan pengiriman PNS untuk mengikuti seminar, bintek kepegawaian dengan anggaran sebesar Rp 370.150.000,-

d. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan ini difokuskan untuk layanan administrasi kantor yaitu Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah, Penyediaan Alat Tulis Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan anggaran sebesar Rp 4.789.839.000,-

e. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan ini hanya difokuskan untuk Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya dengan anggaran sebesar Rp 112.480.000,-

3. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan target sasaran, dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersumber dana dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 21.033.692.000,- dengan capaian fisik sebesar 95,40% dan penyerapan dana atau realisasi keuangan sebesar 79,30%. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah meliputi :

1) Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah

Dana yang dialokasikan untuk program ini sebesar Rp. 12.469.177.000,- dengan capaian fisik sebesar 93,870% dan realisasi keuangan 79,30%, yang diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan manajemen kepegawaian yang meliputi perencanaan dan pengadaan PNS; penataan dan pengembangan PNS; perpindahan PNS; perawatan PNS; penghargaan dan penjatuhan hukuman disiplin PNS; penilaian PNS; serta pemberhentian PNS.

Dengan adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat terkait penundaan penerimaan CPNSD, maka untuk pengadaan CPNSD tidak dilaksanakan.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan kebijakan promosi terbuka dalam pengangkatan pejabat struktural. Dengan mempertimbangkan 1.794 jabatan struktural di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Untuk Bulan November 2016 dilaksanakan proses seleksi promosi terbuka dengan sistem *talent scouting* untuk Jabatan Administrator dan Pengawas dengan peserta yang memenuhi persyaratan sejumlah 7.870 orang terdiri dari Calon Administrator sejumlah 2.857 orang dan Calon Pengawas sejumlah 5.013 orang, sedangkan yang mendaftar online dan Memenuhi Syarat untuk melaksanakan tes *Problem Analysis* sejumlah 1.859 orang terdiri dari Calon Administrator sejumlah 685 orang dan Calon Pengawas sejumlah 1.174 orang.

Hasil yang lain adalah 1.025 SK kenaikan pangkat PNS provinsi, 2.875 SK kenaikan pangkat PNS kabupaten/kota; ujian peningkatan pendidikan sejumlah ~~312~~ 481 orang; seleksi bagi ~~1.732~~ 1.723 pelamar praja IPDN yang memenuhi syarat dan peserta tes capra IPDN yang diterima sejumlah 55 orang; pengiriman tugas belajar S3 sejumlah 8 orang, S2 dan Cost Sharing sejumlah 15 orang; terlaksananya ujian kedinasan bagi PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sejumlah ~~140~~ 150 orang dan Fasilitasi Pem.Kab/Kota sejumlah ~~2.862~~ 1.500 orang ; terlaksananya ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah ~~78~~ 300 orang PNS Provinsi dan ~~2.051~~ 2.000 PNS kabupaten/kota; terselenggaranya tes kompetensi PCAP Kab/Kota sejumlah 18 orang; evaluasi kinerja pejabat fungsional yang dievaluasi di UPT Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sejumlah 1.050 orang; sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian sejumlah 100 orang; penyelesaian izin perkawinan dan perceraian PNS sebanyak 37 SK; tersajikannya 125 peraturan

perundang-undangan pada LS BKD; ~~358~~ 400 izin cuti; ~~185~~ 300 surat keterangan izin belajar, 407 surat keterangan izin penggunaan gelar, 29 surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala, dan pengambilan sumpah/janji PNS sebanyak 481 orang; layanan pusat kebugaran (*fitness center*) dengan pengunjung sebanyak 2.290 orang; bintek kaderisasi kepemimpinan PNS perempuan bagi 50 pejabat struktural perempuan PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bintek penanganan pelanggaran disiplin pegawai bagi 85 petugas pengelola kepegawaian, pembekalan kepada 250 orang PNS yang akan purna tugas; penganugerahan tanda jasa satya lancana karya satya kepada PNS provinsi dan PNS kabupaten/kota sebanyak 2.658 orang; terselenggaranya sidang penyelesaian kasus pelanggaran disiplin PNS sebanyak 8 kali; terselesaikannya up date data kepegawaian sebanyak 16.266 orang, tersusunnya 840 buku saku kepegawaian dan buku saku UPT sejumlah 50, 5 penyempurnaan aplikasi e-file; tersedianya warta kepegawaian selama 10 bulan, rakor kegiatan BKD 12 kali, evaluasi dan monitoring kegiatan sejumlah 12 kali; tersedianya aplikasi simpeg online di 59 SKPD; terlaksananya interkoneksi portal kepegawaian Provinsi dan Kab/Kota se Jawa Tengah ke BKN Jakarta, terpeliharanya aplikasi SAPK BKN; dan penyelesaian SK mutasi sebanyak 1.292 orang, penyelesaian pensiun BUP (Batas Usia Pensiun) sebanyak 727 SK, pensiun janda/duda sebanyak 40 SK, pensiun atas permintaan sendiri sebanyak ~~323~~ 4.054 orang.

2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah

Dana yang dialokasikan untuk program ini sebesar Rp. 370.150.000,- dengan capaian fisik sebesar 54% dan realisasi keuangan 39,82% yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas aparatur melalui pengiriman PNS untuk mengikuti pelatihan, bintek, kursus dan lokakarya kepegawaian. Hasil yang dicapai

yaitu pengiriman PNS untuk mengikuti kursus/pelatihan sejumlah 17 orang dan bintek sebanyak 29 orang.

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, serta Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Alokasi anggaran sebesar Rp. 8.194.365.000,- dengan realisasi fisik 99,61% dan realisasi keuangan 90,81%, yang diarahkan untuk mendukung ketersediaan dan kecepatan layanan administrasi perkantoran, kenyamanan lingkungan kerja guna meningkatkan kualitas tugas pokok dan fungsi kelembagaan. Program-program tersebut dilaksanakan oleh Sekretariat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi : pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya; pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor; pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional; pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor; pemeliharaan rutin/berkala meubelair; pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga; peningkatan sarana dan prasarana kantor; penyediaan jasa surat menyurat; penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik; penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor; jaminan barang milik daerah; penyediaan alat tulis kantor; penyediaan barang cetak dan penggandaan; penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor; penyediaan peralatan rumah tangga; penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; penyediaan makanan dan minuman kantor; penyediaan biaya perjalanan dinas; dan penyediaan jasa pelayanan perkantoran.

4. Permasalahan dan Solusi

4.1. Permasalahan

- a. Alih status PNS ke Provinsi sangat besar \pm 30.000 PNS sehingga rekam data di SAPK perlu waktu cukup;

- b. Data perpindahan pegawai non dikmen belum selesai sehingga BKD Prov masih belum bisa menentukan angka yang pasti;
- c. Belum terbangunnya sinkronisasi yang baik antara data kepegawaian pada Sistem Informasi Kepegawaian Kab/Kota dengan Aplikasi Portal Kepegawaian PNS Se- Jawa Tengah sebagai akibat kurang rutinnya pengiriman data kepegawaian Kab/Kota ke Provinsi serta belum tersedianya akses data secara langsung ke Kab/Kota;
- d. Ketidakjelasan peran Provinsi Jawa tengah dalam pelaksanaan SPCP karena SOP tidak diberikan kepada daerah.
- e. Masih adanya Kabupaten/Kota yang belum menyampaikan usulan SLKS karena masih menunggu edaran dari Pemerintah Pusat terkait :

4.2. Solusi

- a. Proses rekam data SAPK harus dilakukan lebih awal;
- b. Mengkoordinasikan dengan Kanreg I BKN agar segera menyelesaikan data pegawai non dikmen yang mutasi ke Provinsi;
- c. Perlu dilaksanakan konsolidasi dan rekonsiliasi data dengan Kab/Kota serta pemanfaatan webservice sebagai sarana akses data;
- d. Pemberitahuan pengumuman SPCP dan pembentukan tim Penrimaan IPDN
- e. Melakukan koordinasi intensif dan memaksa Kementerian Dalam Negeri dan Sekretariat Militer Presiden untuk segera menyampaikan edaran ke Pemda terkait hal tersebut, bagi Kabupaten/Kota yang belum menyampaikan usulan SLKS agar segera mengusulkan, untuk pengusulan SLKS agar lebih selektif kepada PNS yang benar benar layak mendapatkan, untuk ke depan agar SLKS menjadi salah satu syarat untuk

dalam pemberian penghargaan/reward (promosi jabatan, KP istimewa, pengembangan kompetensi, PNS terbaik, dll) bagi PNS di tingkat Pemda

Demikian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Program/Kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Rencana Kerja Operasional (RKO) Tahun 2016, sebagai bahan pendukung Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Akhir Tahun 2016.

Semarang, Januari 2017

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

Drs. MOHAMAD ARIEF IRWANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19680614 199001 1 001